

DISKURSUS SENGKETA LAUT TIONGKOK SELATAN DI MEDIA SOSIAL TWITTER

Dienda Audra Syari ¹⁾ dan Muhamad Isnaini ²⁾

^{1,2)} Universitas Budiluhur
Email Address : 1971600299@student.budiluhur.ac.id

Tanggal diterima: 16-01-2021

Tanggal direvisi: 04-04-2021

Tanggal disetujui: 10-8-2021

ABSTRACT

This study aims to examine some of the literature on the impact of the South China Sea dispute from the perspective of global communication from the perspective of social media Twitter. The method used is a qualitative approach. This study is to find out how many sources on social media Twitter discuss this global issue and its impact on other countries. The results showed: 1) Since 2012 until now, several sources have discussed the development of studies on the South China Sea Ownership Dispute in the perspective of global communication. Of the many accounts registered on social media Twitter that discuss the issue of the South China Sea, there are 28,031 active authors and 2,412 identified authors who have searched for articles published between the last 5 to 15 years. The results found 21 studies / studies published from Asia, America, and Australia related to the discussion of the South China Sea Ownership Dispute issue from a global communication perspective. The South China Sea dispute is one of the threats that has the potential to have a large negative impact, not only for Indonesia, but also for regional stability in Southeast Asia. 2) The impact arising from the South China Sea Ownership Dispute that I got from qualitative analysis from social media sources Twitter, namely through ASEAN, it is likely that this conflict can be resolved peacefully. In addition, this conflict is able to create global cooperation in several fields between countries regarding the management of the South China Sea area, so that it is expected to be able to calm disputes with the existence of collaborations that build towards a better direction.

Keywords: dispute, social media, Twitter, South China Sea.

© 2022 MetaCommunication: Journal of Communication Studies

How to cite: Syari, D.A., & Isnaini, M. (2022). Diskursus Sengketa Laut Tiongkok Selatan di Media Sosial Twitter. *MetaCommunication: Journal of Communication Studies*, 7(1), 10-22.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji beberapa literatur tentang dampak sengketa Laut Tiongkok Selatan dalam perspektif komunikasi global dengan perspektif media sosial Twitter. Metode yang digunakan dengan pendekatan kualitatif. Kajian ini untuk mengetahui seberapa banyak sumber pada media sosial Twitter yang membahas tentang issue global ini dan dampaknya terhadap negara-negara lain. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Sejak tahun 2012 hingga saat ini, beberapa sumber telah membahas perkembangan studi mengenai Sengketa Kepemilikan Laut Tiongkok Selatan dalam perspektif komunikasi secara global. Dari sekian akun yang terdaftar pada media sosial Twitter yang membahas tentang isu Laut Tiongkok Selatan terdapat penulis aktif mencapai 28.031 dan penulis yang teridentifikasi mencapai 2.412 penelusuran dilakukan terhadap artikel yang terbit antara 5 tahun sampai dengan 15 tahun terakhir. Hasilnya ditemukan 21 kajian/studi yang diterbitkan dari Asia, Amerika, dan Australia terkait dengan pembahasan isu Sengketa Kepemilikan Laut Tiongkok Selatan dalam perspektif komunikasi global. Sengketa Laut Tiongkok Selatan merupakan salah satu ancaman yang berpotensi menimbulkan dampak negatif yang besar, tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi stabilitas kawasan di Asia Tenggara. 2) Dampak yang timbul dari Sengketa Kepemilikan Laut Tiongkok Selatan yang saya dapatkan dari analisis kualitatif dari sumber social media Twitter yaitu melalui ASEAN kemungkinan besar konflik ini dapat diselesaikan dengan damai. Selain itu, konflik ini mampu melahirkan Kerjasama-kerjasama secara global dalam beberapa bidang antar Negara perihal pengelolaan wilayah Laut Tiongkok Selatan, sehingga diharapkan mampu untuk meredakan sengketa dengan adanya kerjasama-kerjasama yang membangun kearah lebih baik.

Kata Kunci: *sengketa, media sosial, Twitter, Laut Tiongkok Selatan.*

PENDAHULUAN

Di abad ke-21, konstelasi dunia diprediksi akan berubah. Kekuatan ekonomi dan politik mulai bergeser dari wilayah Eropa dan Amerika ke wilayah Asia. Bank Pembangunan Asia mengkalkulasi bahwa pada tahun 2050 separuh ekonomi dunia ada di tangan kawasan ini. Selain itu, pendapatan per kapita akan naik enam kali lipat menjadi sekitar 38.600 dolar, menjadikan rakyat Asia semakmur orang-orang Eropa sekarang (Kohli, Sharma, Sood, 2011).

Peningkatan ekonomi yang pesat ini akan dimotori oleh Republik Rakyat Tiongkok (RRT) atau seterusnya disebut Tiongkok. Kemajuan Tiongkok juga didampingi oleh India, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, dan Thailand. Untuk dapat mewujudkan abad Asia tersebut, salah satu syarat yang perlu dipenuhi adalah stabilitas kawasan untuk mendukung kondisi yang ideal bagi pertumbuhan ekonomi.

Menurut hasil analisis cepat dari data yang dikumpulkan oleh *Drone Emprit Publications* sejak tahun 2020 isu sengketa Laut Tiongkok Selatan atau Laut China Selatan telah menjadi trending topik pada media sosial Twitter di beberapa negara besar di dunia yang termasuk salah satunya yaitu Indonesia (Twitter, 2021). Berbagai sengketa dan konflik perbatasan di kawasan berpotensi mengancam stabilitas kawasan Asia tersebut. Salah satu ancaman yang cukup besar

pengaruhnya adalah sengketa Laut Tiongkok Selatan.

Wilayah Laut Tiongkok Selatan sendiri merupakan jalur penting bagi perdagangan dunia dan jalur pemasok suplai minyak bumi ke Asia Timur. Sengketa ini melibatkan banyak negara, baik secara langsung sebagai aktor yang mengklaim kepemilikan wilayah tersebut, maupun secara tidak langsung sebagai aktor yang kepentingannya terganggu.

Di Asia Tenggara sendiri, isu pertahanan telah terwujud dalam diplomasi pertahanan yang telah dilakukan baik secara bilateral maupun multilateral. Secara umum, ada empat pola kerjasama keamanan di Asia Tenggara. Pola pertama adalah kerjasama pertahanan multilateral antara *external powers* atau kekuatan eksternal dan negara-negara di Asia Tenggara yang ditujukan untuk masalah keamanan tertentu. Pola kedua adalah kerjasama pertahanan dan keamanan yang dipimpin Amerika Serikat dengan perjanjian kerjasama dengan sekutu, partner strategis.

Pola ketiga adalah upaya kerjasama multilateral yang dipimpin oleh Tiongkok untuk mengikat ASEAN atau *Association of Southeast Asian Nations* menjadi struktur kerjasama keamanan regional Asia Timur dengan fokus utama pada isu-isu keamanan non-tradisional. Dan pola terakhir adalah kerjasama multilateral dengan ASEAN sebagai pusatnya untuk meningkatkan kerjasama keamanan baik diantara anggotanya

maupun mitra dialog dan diantara anggota *ASEAN Regional Forum* (ARF).

Dalam beberapa cuitan yang dikumpulkan oleh *Drone Emprit Publications* juga membahas analisis emosional dari beberapa akun media sosial Twitter salah satunya yaitu negara-negara yang berada di Eropa menunjukkan analisis emosi sedih dan kecewa. Perasaan sedih di kalangan orang Eropa, karena mereka baik-baik saja dengan Tiongkok selama mereka memiliki pasar yang besar. Ketidakpercayaan mereka saat ini pun berasumsi bahwa Tiongkok dalam banyak masalah.

Kebangkitan Tiongkok dan hegemoni Amerika Serikat, khususnya di kawasan Asia Tenggara, juga menghadirkan kondisi baru pada pergerakan dunia saat ini. Kebangkitan Tiongkok memberikan sinyal akan (atau sedang) adanya perubahan dalam keseimbangan kekuatan baru dalam hubungan internasional. Sistem unipolar yang selama ini dikomandoi oleh Amerika, khususnya di Asia Tenggara, terancam dengan kehadiran Tiongkok di kawasan ini.

Kebijakan “*US pivot to Asia*” yang digencarkan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Barrack Obama memberikan sinyal bahwa Asia merupakan kawasan penting bagi Amerika dan terdapat kepentingan nasionalnya di kawasan ini. Beberapa pakar bahkan mendiskusikan adanya kemungkinan persaingan yang akan diakhiri dengan perang atau konflik militer di abad 21.

Laut Tiongkok Selatan merupakan “laut setengah tertutup” (*semi-enclosed sea*).

Letaknya yang dikelilingi oleh berbagai negara karena merupakan laut setengah tertutup berakibat pada kesulitan penentuan batas wilayah laut dari masing-masing negara, sehingga hal tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan wilayah Laut Tiongkok Selatan tersebut menjadi sengketa beberapa negara yang kemudian berujung kepada konflik.

Sengketa kepemilikan atau kedaulatan teritorial di Laut Tiongkok Selatan sesungguhnya merujuk pada kawasan laut dan daratan di dua gugusan kepulauan yaitu Paracel dan Spratly (Nainggolan, 2013). Kepulauan Paracel dan Spratly kemungkinan memiliki cadangan besar sumber daya alam di sekelilingnya. Tiongkok memperkirakan cadangan minyak yang terkandung sebanyak 213 miliar barel atau sepuluh kali lipat dari cadangan milik Amerika Serikat (Wiranto, 2016, hlm. 42).

Sumber daya alam yang terdapat di Laut Tiongkok Selatan bukan hanya sebatas minyak bumi dan bahan mineral lainnya saja, sumber daya laut yang dihasilkan juga sangat melimpah, laut ini terkenal dengan berbagai macam jenis ikan. Selain itu, daya tarik Laut Tiongkok Selatan tersebut juga terdapat pada fungsinya sebagai jalur perdagangan. Hal tersebut yang membuat negara-negara maju menjadikan stabilitas kawasan Laut Tiongkok Selatan sebagai prioritas dalam aktivitas politik luar negerinya.

Dari Gambar 1 disebutkan bahwa cuitan pada media social Twitter yang membahas sengketa Laut Tiongkok Selatan ini



Gambar 1 Social Media Twitter Analisis

Sumber: Publikasi Emprit Drone, 2020.

didominasi oleh akun-akun besar dari negara India dan Amerika Serikat. Dimana sebagian besar juga membahas akar dari konflik Laut Tiongkok Selatan yang dimulai ketika klaim pertama kali pada tahun 1947 oleh Tiongkok yang secara sepihak mengklaim hampir seluruh wilayah Laut Tiongkok Selatan dengan menerbitkan peta yang memberi tanda sembilan garis putus-putus di seputar wilayah itu (Akmal & Pazli, 2016, hlm. 2).

Dalam perkembangannya, klaim tersebut memunculkan banyak reaksi dari beberapa negara yang juga merasa berhak atas kawasan tersebut. Setidaknya ada enam negara yang berselisih di wilayah Laut Tiongkok Selatan. Wilayah tersebut di antaranya adalah Tiongkok, Vietnam, Taiwan, Filipina, Malaysia, dan Brunei. Setiap negara memiliki pandangannya masing-masing yang berbeda terkait kepemilikan atas kawasan tersebut.

Klaim yang dilakukan oleh Tiongkok, Taiwan, dan Vietnam didasarkan pada sejarah

penemuan dan pendudukan pulau-pulau di gugusan Kepulauan Spratly dan Paracel, Filipina didasarkan pada kelanjutan klaim landas kontinen, sedangkan Malaysia dan Brunei mengklaim perpanjangan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) dan landas kontinen Indonesia (Wiranto, 2016, hlm. 8).

Konflik Laut Tiongkok Selatan ini terus berlarut-larut dan tidak terselesaikan. Muncul kekhawatiran konflik ini akan meluas menjadi konflik keamanan regional dan menimbulkan potensi ancaman (Riawan dan Kaya, 1993), bukan mustahil Tiongkok (sebagai negara yang memiliki kekuatan militer paling potensial, jika dibandingkan dengan Vietnam sekarang) akan menggunakan segala sarana untuk menghadapi segala hal yang terjadi dalam menyelesaikan kasus di Spratly ini. Dan bila hal ini terjadi, akan ada ancaman dari Tiongkok bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Dalam konflik Laut Tiongkok Selatan atau Laut Tiongkok Selatan, selain ketegangan yang terjadi akibat tumpang tindihnya klaim antar negara bersengketa yang belum bisa dihentikan (Buszynski, 2012: 139-156), hingga kini, terdapat juga perkembangan yang tidak menggembirakan terutama mengenai hubungan antara dua negara anggota ASEAN yaitu Vietnam dan Filipina dengan Tiongkok.

Filipina misalnya telah memberikan beragam laporan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh kapal-kapal Tiongkok yang melewati perairan yang selama ini disengketakan, bahkan terjadi beberapa insiden antara kapal patroli Tiongkok dengan kapal-kapal nelayan Filipina. Selanjutnya Tiongkok juga dituduh melakukan pemancangan instalasi baru di wilayah yang disengketakan serta mengintimidasi kapal - kapal eksplorasi minyak Filipina. Sementara Vietnam telah melakukan paling tidak empat kali pertemuan bilateral dengan Tiongkok pada awal 2011 dalam rangka membicarakan perbedaan antar mereka mengenai Laut Tiongkok Selatan.

Sayang sekali beberapa perilaku Tiongkok seperti, semakin meningkatnya jumlah dan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan kapal-kapal Tiongkok di perairan Vietnam akhirnya membuat segala hasil pertemuan bilateral antar keduanya menjadi tiada manfaat. Insiden seperti pemotongan kawat-kawat di tempat eksplorasi minyak Vietnam yang dilakukan Tiongkok juga pada akhirnya semakin memperkeruh suasana dan

membuat inisiatif baru bagi Vietnam untuk selalu meningkatkan kapabilitas militernya di Laut Tiongkok Selatan (Sudira, 2014: 143). Dari semua penjelasan dan analisis di atas penulis bermaksud mengkaji beberapa literatur tentang dampak sengketa Laut Tiongkok Selatan dalam perspektif komunikasi global dengan perspektif media social Twitter.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan kajian ini adalah deskriptif analisis, yaitu dengan menganalisa data dan fakta yang ada dihadapkan dengan kondisi nyata. Pembahasan kajian ini menggunakan pendekatan kepustakaan dan beberapa publikasi pada akun media sosial Twitter.

Kajian menitikberatkan pada perkembangan studi mengenai Kepemilikan Laut Tiongkok Selatan dalam perspektif komunikasi global. Selain itu, kajian juga dilengkapi dengan penelusuran mengenai isu-isu yang muncul dari penggunaan komunikasi global media – media sosial di seluruh dunia yang diterapkan untuk meneliti Sengketa Kepemilikan Laut Tiongkok Selatan. Alasan untuk menelusuri isu-isu tersebut adalah agar dapat diketahui mengenai posisi terkini penggunaan komunikasi global media – media sosial sebagai alat analisis Sengketa Kepemilikan Laut Tiongkok Selatan.

Penulis juga mencari rujukan artikel Google Scholar dengan kata kunci dampak sengketa Laut Tiongkok Selatan dalam perspektif global. Disamping itu, penulis

menganalisis permasalahan menggunakan rujukan dari beberapa artikel jurnal yang memiliki relevansi dengan studi ini. Selanjutnya penulis menganalisis fakta-fakta yang didapatkan dari beberapa media berita online untuk menambah elaborasi dan penjelasan dari temuan-temuan yang disajikan dengan berlandaskan pada penggunaan *big data* (maha data). Menelusuri dan menelusuri ulang literatur untuk mengumpulkan dan mengoleksi data bagi kepentingan analisis data merupakan elemen yang kritikal dari proses mengembangkan kajian literature (Baker, 2016).

Mesin pencari yang digunakan dalam kajian ini adalah Google Scholar, e-Journal, DOAJ, dan Research Gate. Penelusuran dilakukan terhadap artikel yang terbit antara lima tahun sampai dengan lima belas tahun terakhir. Hasilnya ditemukan 21 kajian atau studi yang diterbitkan dari Asia, Amerika, dan Australia terkait dengan pembahasan isu Sengketa Kepemilikan Laut Tiongkok Selatan dalam perspektif komunikasi global. Penelusuran kemudian dilanjutkan dengan menyelidiki dampak dari Sengketa Kepemilikan Laut Tiongkok Selatan dari perspektif komunikasi global hingga media social Twitter serta mencari isu-isu yang muncul terkait komunikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Persengketaan Laut Tiongkok Selatan

Laut Tiongkok Selatan merupakan sebuah kawasan perairan dan gugusan

kepulauan yang terdiri dari dua Pulau besar yaitu Spratly dan Paracels. Luas dari kawasan ini membentang melewati beberapa Negara, mulai dari Selat Malaka (Singapura) sampai ke Selat Taiwan (Nainggolan, 2013). Kawasan ini memiliki 3,5 juta kilometer persegi dan sumberdayanya diperebutkan oleh beberapa negara termasuk Tiongkok, Taiwan, Vietnam, Filipina, Indonesia dan Malaysia (Gau, 2012; Vujakovic, 2020). Meskipun Indonesia bukan negara yang aktif untuk saling klaim, artinya hanya menjaga kedaulatan wilayahnya dari klaim dari negara lain.

Perebutan kawasan ini telah berlangsung sejak lama dan menyimpan sisi historis dari masing-masing negara yang saling klaim. Misalnya saja Filipina yang melaporkan pelanggaran kapal Tiongkok wilayah perairannya. Kemudian Vietnam dengan Tiongkok. Manuver yang dilakukan oleh Tiongkok tidak lain karena keyakinan mereka atas kepemilikan Laut Tiongkok Selatan sebagai sebuah warisan (Hayton, 2019) serta ambisi mereka menjadi kekuatan ekonomi dunia dengan memanfaatkan Laut Tiongkok Selatan yang menyimpan berjuta potensi. Disisi lain, negara-negara seperti Jepang, India, dan Amerika Serikat juga tidak tinggal diam untuk menguasai wilayah Laut Tiongkok Selatan yang dapat memberikan manfaat besar dalam ekonomi suatu negara (Junef, 2018).

Perkembangan situasi dan kondisi di Laut Tiongkok Selatan sangat cepat dan dinamis. Tiongkok secara tegas menyatakan klaim atas seluruh wilayah perairan Laut

Tiongkok Selatan, negara-negara lain juga tidak mau kalah dalam menegaskan kepentingannya di wilayah sengketa tersebut. Negara-negara yang berstatus pengklaim maupun negara yang bukan pengklaim Laut Tiongkok Selatan sebagai wilayah rebutan kepentingan menimbulkan ketegangan hubungan antar negara, baik secara diplomatik maupun operasional di lapangan.

Dalam beberapa tahun terakhir, Amerika Serikat telah melibatkan diri dalam konflik di Laut Tiongkok Selatan. Kondisi ini dapat terlihat adanya latihan gabungan antara Amerika Serikat dan Vietnam di Laut Tiongkok Selatan sebagai salah satu unjuk kekuatan militer guna menghadapi Tiongkok dalam konflik di Laut Tiongkok Selatan. Sementara Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi kedua terbesar setelah Amerika Serikat, tidak dapat dipandang sebelah mata dimana telah memperkuat militernya sebagai upaya mempertahankan hegemoninya di Laut Tiongkok Selatan.

Di samping itu, berkembang pula pendapat dan kekhawatiran beberapa negara akan agresivitas ambisi Tiongkok melalui retorikanya "*Tiongkok's Peaceful Rise II*" dalam menyelesaikan konflik perbatasan, termasuk persoalan Laut Tiongkok Selatan. Indonesia sebagai negara yang tidak terlibat langsung terhadap konflik di kawasan tersebut memandang penting untuk bersikap proaktif, mengingat kawasan Laut Tiongkok Selatan merupakan jalur penting yang sering dilewati oleh kapal-kapal dagang, maupun pesawat-

pesawat komersial Indonesia guna menunjang perdagangan Internasional.

Posisi Laut Tiongkok Selatan rawan konflik dan berimplikasi besar di kemudian hari bila pecah konflik bersenjata terbuka di perairan tersebut, maka penelitian ini akan mengupas, membahas dan menganalisis beberapa penyebab dan implikasi konflik secara gamblang dan komprehensif. Secara khusus, Indonesia, bukan negara pengklaim memiliki kepentingan. Namun, klaim mutlak yang dilancarkan Tiongkok atas seluruh wilayah perairan Laut Tiongkok Selatan, yang meliputi seluruh kepulauan dan pulau di dalamnya, pada tahun 2012 tersebut, turut mengancam kedaulatan dan kepentingan Indonesia di wilayah perairan Natuna. Natuna merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau.

Dengan klaim mutlak tersebut, bukan saja kedaulatan wilayah Indonesia atas Kepulauan Natuna yang terancam, tetapi juga seluruh kepentingan Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan berdasarkan konsep Wawasan Nusantara, yang dihormati eksistensinya berdasarkan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) tahun 1982, khususnya hak-hak pengelolaan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) hingga 200 mil laut. Hak-hak tradisional nelayan Indonesia di sekitar perairan Kepulauan Natuna sudah terancam.

Kawasan Laut Tiongkok Selatan bila dilihat dalam tata lautan internasional, merupakan kawasan yang memiliki nilai ekonomis, politis, dan strategis. Besarnya

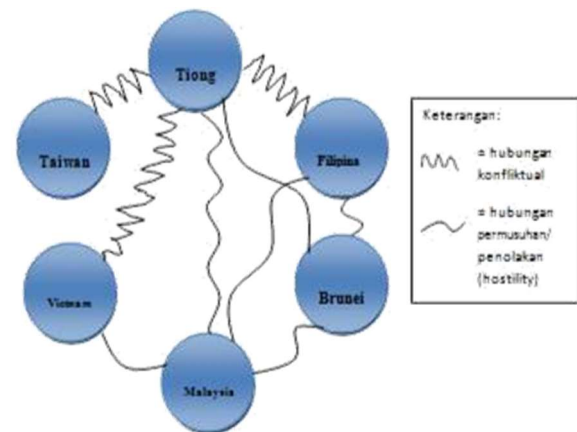
potensi yang dimiliki oleh kawasan Laut Tiongkok Selatan menjadikan kawasan ini mengandung potensi konflik sekaligus potensi kerjasama. Kawasan Laut Tiongkok Selatan memiliki kandungan minyak bumi dan gas alam serta peranannya yang sangat penting sebagai jalur pelayaran, perdagangan dan distribusi minyak dunia.

Potensi lainnya berupa ikan dan sumber daya mineral. Cadangan minyak potensial Laut Tiongkok Selatan sebanyak 213 milyar barel dan sumber daya hidro karbon Laut Tiongkok Selatan yang sering dilupakan adalah gas alam. Bahkan gas alam diperkirakan sebagai sumber daya hidrokarbon yang jumlahnya paling banyak. Menurut estimasi Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) 60% - 70% hidrokarbon di kawasan merupakan gas alam hal ini menjadikan Laut Tiongkok Selatan sebagai objek perdebatan regional selama bertahun-tahun.

Konflik di Laut Tiongkok Selatan tidak bisa lepas dari persoalan kebutuhan akan sumber daya yang langka seperti minyak bumi, gas alam, ikan, dan transportasi. Minyak menjadi incaran utama karena hingga saat ini perebutan untuk mendapatkan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui ini tidak dapat dilepaskan dari konflik militer bahkan invasi militer.

Sejak awal dekade 90- an hingga saat ini Tiongkok telah menjadi salah satu dari importir minyak terbesar di dunia. Hal ini menjadikan negara tersebut harus selalu berusaha mendapatkan suplai minyak dari luar

dalam jumlah cukup agar perekonomiannya dapat tetap berjalan dan berkembang pesat. Kandungan minyak dan gas alam yang berada di kawasan Laut Tiongkok Selatan membuat keterlibatan dalam konflik di kawasan ini menjadi tak terelakkan.



Gambar 2. Hubungan Antaraktor dalam Sengketa Laut Tiongkok Selatan
Sumber : Dokumen Pribadi

Klaim Tiongkok tidak hanya diwujudkan dalam bentuk sikap politik, tetapi juga dalam bentuk lain. Di bidang militer, Tiongkok sering melakukan aksi patroli di perairan tersebut yang kadang memicu bentrok dengan kapal dari negara pengklaim lain seperti Vietnam dan Filipina. Di bidang eksplorasi, Tiongkok juga menempatkan peralatan pengeboran di beberapa titik di Laut Tiongkok Selatan. Pihak kedua yang mengklaim kepemilikan seluruh wilayah Laut Tiongkok Selatan adalah Taiwan. Sebagai entitas yang pernah mewakili negara Tiongkok secara resmi di Dewan Keamanan PBB, klaim Taiwan juga didasari oleh latar belakang sejarah seperti yang dikemukakan oleh Tiongkok. Saat ini, Taiwan menguasai

Pulau Aba atau Taiping Dao yang merupakan pulau terbesar di Kepulauan Spratly.

Pihak ketiga yang menjadi aktor langsung adalah Vietnam. Negara ini mendasarkan klaimnya pada dua hal. Pertama, warisan kolonial dari Perancis yang dulu menguasai Kepulauan Paracel dan Spratly pada awal abad ke-20. Kedua, argumentasi landas kontinen, di mana Kepulauan Spratly merupakan daerah lepas pantai dari Provinsi Khanh Hoa. Banyak sekali klaim wilayah Vietnam di Laut Tiongkok Selatan yang tumpang tindih dengan klaim Tiongkok.

Tidak mengherankan jika kedua negara ini sering terlibat dalam ketegangan politik dan militer akibat berbagai insiden di Laut Tiongkok Selatan. Aktor langsung keempat adalah Filipina. Klaim wilayah negara ini didasarkan pada prinsip landas kontinen yang mencakup kepulauan Spratly. Ada delapan pulau di Spratly yang menurut Filipina menjadi bagian dari Provinsi Palawan. Filipina juga mempunyai istilah sendiri untuk menyebut bagian dari Laut Tiongkok Selatan yang diklaim, yaitu Laut Filipina Barat.

Negara pengklaim kelima adalah Malaysia yang menyatakan bahwa sebagian wilayah Kepulauan Spratly adalah miliknya berdasarkan landas kontinen. Ada tiga pulau yang sudah ditempati oleh Malaysia di kepulauan tersebut. Klaim wilayahnya ini tumpang tindih dengan klaim Tiongkok dan Filipina. Selama ini, Malaysia tidak terlalu aktif dalam ketegangan dan aksi saling membalas antara Tiongkok dengan Vietnam dan Filipina. Negara keenam yang menjadi

aktor langsung dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan adalah Brunei Darussalam.

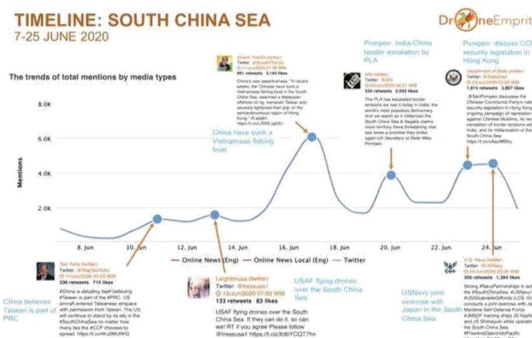
Brunei sendiri tidak mengklaim pulau-pulau yang ada di wilayah Laut Tiongkok Selatan, tetapi hanya mengklaim bahwa landas kontinen dan ZEE-nya meliputi Louisa Reef dan perairan di sekitar Kepulauan Spratly. Sama seperti Malaysia, Brunei juga kurang terlibat dalam aksi provokatif negara-negara lainnya yang dapat mengescalasi konflik.

Meskipun Indonesia bertindak sebagai *Non-Claimant State*, namun posisi Indonesia sebagai salah satu pendiri ASEAN yang juga memiliki tujuan negara untuk ikut berperan aktif dalam ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hal ini sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke-4 mengharuskan Indonesia untuk mengambil peran sebagai penyeimbang, dan pereda penyelesaian konflik, terutama pada kawasan konflik Laut Tiongkok Selatan (Saragih, 2018). Hal yang dibuktikan dengan keikutsertaan Indonesia dalam pembentukan asosiasi maupun forum-forum seperti *Workshop on Managing Potential Conflicts in the South China Sea, Declaration of Conduct, Code of Conduct in the South China Sea*, dan lain sebagainya.

Pembahasan Analisis Mahadata

Data analisis (Fahmi, 2016) pada penggunaan big data (maha data) yang telah disajikan di website drone empiris ini adalah kumpulan tweets dari periode 7-25 Juni 2020. Tweet-tweet yang dikeluarkan oleh pejabat public, media, media official instansi

pemerintah dan lembaga intelijen dari beberapa negara yang berkepentingan terangkum dalam timeline dibawah ini:



Gambar 3. Mahadata

Sumber : Dokumen Drone Emprit.

Berdasarkan data tersebut ada beberapa catatan penting yang mewarnai dinamika konflik terbuka di Laut Tiongkok Selatan. Pertama, Tiongkok menganggap Taiwan bagian dari Tiongkok. Sejarah panjang dua negara serumpun ini semakin mempertajam konflik keduanya. Hal itu diikuti penguatan militer Taiwan untuk menegaskan kedaulatannya di Laut Tiongkok Selatan (Arbar, 2020).

Kedua, Angkatan udara Amerika Serikat atau USAF (*United States Air Force*) menerbangkan drone di Laut Tiongkok Selatan membuktikan kepentingan atau intervensi Amerika Serikat dalam wilayah tersebut. Ketiga, Tiongkok menenggelamkan kapal ikan Vietnam. Keempat, angkatan laut Amerika Serikat atau *US Navy* melakukan latihan gabungan dengan Jepang di Laut Tiongkok Selatan. Kelima, Menteri Luar Negeri secara terbuka menantang Tiongkok dengan melakukan kerjasama dengan India. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan

Amerika Serikat mengenai undang-undang keamanan di Hongkong.

Ketegangan secara fisik antara negara yang berkepentingan diikuti di media daring. Pergerakan yang semakin meruncing di sosial media tentang isu Laut Tiongkok Selatan telah banyak menyita atensi masyarakat terutama akun dengan jumlah pengikut banyak. Namun berdasarkan *Social Network Analysis* yang diambil dari Drone Emprit menjelaskan bahwa India dan Amerika Serikat banyak mendiskusikannya di Twitter.

Ramainya diskusi *netizen* (warga di sosial media) Bermula dari latihan militer bersama yang dilakukan Amerika Serikat dan Tiongkok dikawasan Laut Tiongkok Selatan kemudian menimbulkan gurauan di Twitter mengenai persaingan strategis yang semakin dalam dan terbuka oleh kedua negara (Hindustan Times, 2020). Bahkan, angkatan laut dan media Tiongkok saling bertukar Hashtag di Twitter yang mengakibatkan saling sindir dengan memperlihatkan kekuatan para armadanya.

Melalui *Social Networking Analysis* dan lokasi dimana *tweet* itu berasal, isu laut Tiongkok Selatan banyak dibicarakan di beberapa seperti India, Amerika Serikat, Hong Kong, Australia, dan Taiwan. Seperti misalnya Taiwan yang menjadi pihak ketiga dari perselisihan Tiongkok dengan Filipina. Kemudian hal ini tentu akan berimplikasi secara politik bagi Taiwan (Hsiao, 2017). Dari sekian akun yang membahas tentang isu Laut Tiongkok Selatan terdapat penulis aktif mencapai 28.031 dan penulis yang

teridentifikasi mencapai 2.412. Sementara jika dilihat dari asal kota dimana penulis atau akun itu berada, sebarannya adalah sebagai berikut:



Gambar 4. Negara-negara Pembahas Isu
Sumber : Dokumen Drone Emprit.

Adapun dari sudut pandang Indonesia berdasarkan data cuitan dari Menteri Luar Negeri Indonesia mengindikasikan sifat netral dan posisi Indonesia dalam konflik Laut Tiongkok Selatan. Bahkan, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi ikut serta angkat bicara pada konferensi persnya, dan mengatakan bahwa semua negara harus berkontribusi untuk mempertahankan stabilitas dan perdamaian di Laut Tiongkok Selatan.

Dengan kata lain, Indonesia menginginkan semua pihak untuk tidak melakukan tindakan yang dapat memperburuk suasana di kawasan Laut Tiongkok Selatan (BBC Indonesia, 2020), dengan sikap konsisten yang diperlihatkan Indonesia dalam kasus Laut Tiongkok Selatan. Indonesia hanya berharap untuk setiap negara dapat menghormati dan menghargai hukum internasional yang terdapat didalam Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa yang menyangkut

Hukum Laut atau UNCLOS 1982. Beberapa catatan penting yang bisa dirangkum adalah:

- Tidak ada alasan untuk bernegosiasi dengan Beijing (Tiongkok)
- Posisi Indonesia sudah jelas yaitu berdasarkan UNCLOS 1982
- Indonesia menolak negosiasi
- Menolak pengakuan Nine-Dash Line oleh Tiongkok

Sengketa Laut Tiongkok Selatan merupakan salah satu ancaman yang berpotensi menimbulkan dampak negatif yang besar, tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi stabilitas kawasan di Asia Tenggara. Hingga saat ini, secara umum sengketa tersebut berada dalam tahap segregasi, bahkan untuk hubungan Vietnam dengan Tiongkok sudah masuk tahap polarisasi.

Untuk menyelesaikan sengketa tersebut, Indonesia muncul sebagai penggagas upaya-upaya perundingan secara damai dengan mengajak negara-negara yang bersengketa agar mau duduk bersama dalam satu forum multilateral. Namun, peran Indonesia tersebut masih menghadapi tantangan-tantangan, baik berasal dari dalam diri Indonesia sendiri berupa relatif lemahnya posisi tawar terhadap Tiongkok dan negara-negara pengklaim lainnya, maupun berasal dari luar Indonesia. Hal ini berupa perbedaan pendekatan dan keterlibatan pihak-pihak asing yang turut memperkeruh sengketa.

Akibatnya, Indonesia kesulitan untuk melakukan intervensi lebih jauh dan masih berkutat pada level intervensi yang rendah berupa konsiliasi. Padahal, dalam tahap konflik yang sudah masuk polarisasi, Indonesia perlu melakukan mediasi kekuatan. Dengan kata lain, upaya yang dilakukan

Indonesia masih sebatas pengelolaan, belum pada penyelesaian konflik.

Diplomasi pertahanan Indonesia menerapkan beberapa strategi yaitu: Dalam aspek negara, dimana Indonesia melakukan strategi diplomasi terhadap negara-negara yang berkonflik di Laut Tiongkok Selatan dapat berkurang ketegangannya. Selain itu, melalui konflik ini, Indonesia sebagai motor dan pengagas terbukanya kerjasama multilateral antara negara-negara yang aktif dalam konflik tersebut.

Indonesia di bawah kepemimpinan Joko Widodo atau Jokowi dapat diperkirakan terus menjalankan aksi unilateral untuk memperkuat posisi Indonesia, baik melalui pengiriman tenaga militer dan peningkatan kegiatan ekonomi yang diarahkan negara. Namun, Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi belum menjalankan peran kepemimpinan yang efektif di dalam ASEAN terkait isu lebih luas mengenai Laut Tiongkok Selatan.

Dalam aspek laut, Indonesia walaupun ingin memperjuangkan dan berperan aktif dalam konflik ini, namun juga mempertahankan wilayah kedaulatannya. Strategi Indonesia dalam aspek maritim dengan penguatan kapal perang demi menjaga daerah tersebut agar tetap stabil.

Indonesia harus tetap optimis bahwa sengketa ini dapat diselesaikan dalam koridor perundingan yang damai. Secara militer, Indonesia dan empat negara anggota ASEAN yang terlibat sengketa memang tidak bisa menyaingi kekuatan militer Tiongkok. Akan tetapi secara ekonomi, kelima negara tersebut

merupakan mitra dagang yang sangat penting bagi Tiongkok, terutama dalam kerangka ACFTA atau *ASEAN-China Free Trade Area*.

Resiko kerugian yang akan dialami jika Laut Tiongkok Selatan menjadi ajang pertempuran militer sangatlah besar, mengingat jalur ini digunakan untuk lalu lintas energi dan perdagangan negara-negara di sekitar kawasan. Dua faktor ini diharapkan menjadi media bagi pembangunan kepercayaan (*trust building*) yang dapat digunakan Indonesia untuk melanjutkan proses penyelesaian sengketa.

Kini, target yang perlu dicapai Indonesia hanya satu, yaitu mewujudkan aturan main (*Code of Conduct*) di Laut Tiongkok Selatan. Jika aturan main tersebut disepakati, Indonesia akan mendapat dua keuntungan sekaligus. Pertama, ancaman sengketa tersebut terhadap pertahanan negara menjadi hilang. Kedua, peran Indonesia akan diakui secara khusus di tingkat regional ASEAN dan secara umum di tingkat internasional, sehingga akan menaikkan posisi tawar Indonesia sebagai modal untuk memperjuangkan kepentingan nasional selanjutnya

KESIMPULAN

Sejalan dengan penjelasan tersebut serta kaitannya dengan dampak dalam Perspektif Komunikasi Global dan media sosial Twitter, maka penelitian ini menyimpulkan bahwa sejak tahun 2012 hingga saat ini, beberapa sumber telah membahas perkembangan studi mengenai Sengketa Kepemilikan Laut

Tiongkok Selatan dalam perspektif komunikasi secara global.

<https://doi.org/10.1080/00908320.2012.647499>

Kedua, dampak yang timbul dari Sengketa Kepemilikan Laut Tiongkok Selatan yaitu melalui ASEAN, kemungkinan besar konflik ini dapat diselesaikan dengan damai. Selain itu, konflik ini mampu melahirkan kerjasama-kerjasama secara global dalam beberapa bidang antar Negara perihal pengelolaan wilayah Laut Tiongkok Selatan, sehingga diharapkan mampu untuk meredakan sengketa dengan adanya kerjasama-kerjasama yang membangun kearah lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal., & Pazli. (2016). Strategi Indonesia Menjaga Keamanan Wilayah Perbatasan terkait Konflik Laut Cina Selatan pada Tahun 2009 - 2014. *Journal of International Society*, 3(1), 1-13.
- Baker, Joy D. "The Purpose, Process, and Methods of Writing a Literature Review," *AORN Journal* 103, no 3 (2016):265–269.
<https://doi.org/10.1016/j.aorn.2016.01.016>
- Buszynski, Leszek, 2012. "The South China Sea: Oil, Maritime Slaims, and U.S. – China Strategic Rivalry".The Washington Quaterly, Spring.
- Fahmi, I. (2016). Drone Emprit: Software for media monitoring and analytics. Available at <http://pers.droneemprit.id>
- Gau, M. S. T. (2012). The U-Shaped line and a categorization of the ocean disputes in the South China Sea. *Ocean Development and International Law*, 43(1), 57–69.

- Hayton, B. (2019). The Modern Origins of China's South China Sea Claims: Maps, Misunderstandings, and the Maritime Geobody. *Modern China*, 45(2), 127–170.
<https://doi.org/10.1177/0097700418771678>
- Junef, M. (2018). Sengketa Wilayah Maritim di Laut Tiongkok Selatan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(2), 219-240.
- Kohli, H. S., Sharma, A., & Sood, A. (Eds.). (2011). *Asia 2050: realizing the Asian century*. SAGE Publications India.
- Nainggolan, P. P. (Ed.). (2013). *Konflik Laut China Selatan dan Implikasinya terhadap Kawasan*. Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) dan Azza Grafika.
- Riawan, F., & Kaya, R. (1993, 7 September). "Spartly dalam Perspektif Keamanan Asia Tenggara". *Teknologi Strategi Militer*, hlm. 40 - 42.
- Saragih, H. M. (2018). Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Konflik Laut China Selatan. *Ilmu Politik Dan Komunikasi*, VIII(1).
<https://doi.org/10.34010/JIPSI.V8I1.880>
- Sudira, I Nyoman, 2014, "Konflik Laut China Selatan dan Politik Luar Negeri Indonesia ke Amerika dan Eropah". *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* Print ISSN: 2615- 2562/online ISSN: 2406-8748 Vol. 10 No. 2 Tahun 2014.
- Twitter. (2021). Halaman Twitter Fahmi Alfansi.Diambil dari twitter.com.
- Wiranto, S. (2016). *Resolusi Konflik Menghadapi Sengketa Laut Tiongkok Selatan dari Perspektif Hukum Internasional*. Yogyakarta: Leutikaprio.